ANALISIS YURIDIS SIFAT KEILMUAN ANTROPOLOGI HUKUM DAN PERKEMBANGANNYA

UMUL CHAIR
Umulchair30092019@gmail.com
2010003600362
UNIVERSITAS EKASAKTI PADANG

A. PENDAHULUAN

Kata analisis diadaptasi dari bahasa Inggris “analysis” yang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kuno “ἀνάλυσις” (dibaca Analisis).

Kata Analisis terdiri dari dua suku kata, yaitu “ana” yang artinya kembali, dan “luein” yang artinya melepas atau mengurai. Bila digabungkan maka kata tersebut memiliki arti menguraikan kembali. Menurut asal katanya tersebut, analisis adalah proses memecah topik atau substansi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik.

Jadi secara umum, pengertian analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti; mengurai, membedakan, dan memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis

menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Antropologi hukum adalah ilmu yang saat ini masih dalam masa pertumbuhan. Ini mempelajari kekhasan bentuk hukum aktivitas manusia dalam periode sejarah yang berbeda dan dalam keadaan yang sama sekali berbeda. Bagi para peneliti, perkembangan bidang ini sangat penting karena membantu mengenali keragaman hukum dunia dan untuk melihat hukum melalui perspektif persepsi perwakilan dari berbagai bangsa dan budaya.

B. PEMBAHASAN

Ilmu tentang hayati terdiri dari:

1. Paleo Antropologi, yaitu mempelajari tentang asal usul manusia dan perkembangannya. Metode yang digunakan dengan penggalian fosil-fosil. Bagian yang dipelajari adalah organ-organ dalam tubuh.
2. Antropologi Fisik, yaitu mempelajari bentuk-bentuk manusia, baik bagian dalam maupun bagian luar tubuh. Tujuannya mempelajari corak ragam manusia.

Pembagian Antropologi

Antropologi mempelajari perkembangan kehidupan manusia dan budayanya, dengan cabang-cabang ilmu, diantaranya; ilmu PraSejarah untuk mempelajari kehidupan asal usul manusia, dan untuk mengetahui ragam bahasa manusia maka harus mempelajari Etnolinguistik, sedangkan ilmu yang mempelajari cara manusia berbangsa dan berbudaya disebut Etnologi.

Antropologi adalah studi ilmu yang mempelajari tentang manusia dari Aspek Budaya, Perilaku, Nilai, Keanekaragaman, dan lainnya.

Antropologi terbagi dalam: Antropologi Ekonomi, Antropologi Politik, Antropologi Pendidikan, dan Antropologi Hukum.

Antropologi Hukum merupakan ilmu yg mempelajari manusia dengan kebudayaan, khususnya di bidang Hukum, atau ilmu tentang Manusia dalam kaitannya dengan Kaidah-kaidah sosial yang bersifat Hukum.

Budaya dan Kebudayaan Hukum

Kebudayaan hukum adalah kekuasaan yang digunakan oleh penguasa untuk mengatur masyarakat agar tidak melanggar kaidah-kaidah sosial yang telah ada dalam masyarakat. Hukum diperlukan meski telah ada kaidah atau norma dalam masyarakat, agar terdapat keteraturan dalam kehidupan manusia melalui hukum tertulis dengan sanksi yang nyata disamping norma dan kaidah yang sanksinya lebih bersifat sosial atau akhirat. Sebagai Ilmu Pengetahuan, Antropologi Hukum dicirikan oleh 3 (tiga) hal yaitu adanya: Objek, Metode, dan Sistem Antropologi Hukum sebagai ilmu pengetahuan yang merupakan spesialisasi dari Antropologi Budaya, memiliki karakter:

1. Antropologi Hukum, adalah Ilmu pengetahuan (logos) tentang Manusia (antropos) yang berhubungan dengan Hukum
2. Manusia, adalah manusia yang hidup bermasyarakat, masyarakat yang masih sederhana budayanya (primitif) dan yang sudah Maju (modern)
3. Budaya adalah Budaya Hukum, yaitu segala bentuk perilaku budaya manusia yang mempengaruhi Masalah Hukum

Budaya adalah milik bersama yang perlu dipertahankan atau dilestarikan. Budaya hukum adalah tanggapan masyarakat terhadap suatu perbuatan yang dianggap baik, yang hal ini juga bergantung pada sikap penegak hukum. Nilai budaya atau Postulat adalah nilai yang ada dalam masyarakat modern dan masyarakat sederhana yang dinilai baik atau dipertahankan. Masalah Hukum tidaklah hanya pada masalah hukum yang normatif (undang-undang), atau masalah hukum yang merupakan pola perilaku yg sering terjadi (hukum adat), tetapi juga masalah budaya terhadap suatu masalah Hukum, dikarenakan adanya Faktor Budaya yang mempengaruhinya, yaitu:

1. Faktor-faktor Budaya yg melatarbelakangi Masalah Hukum ; misalnya, Cara-cara menyelesaikan Masalah Perselisihan dikalangan Orang Batak, tidak sama dengan orang Minang, Jawa, Bali, Maluku dan lainnya.
2. Cara-cara tersebut menjadi Objek perhatian Antrop Hukum

Arena Kajian Antropologi Hukum

Kajian Antropologi Hukum adalah menggali norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Arena Antropologi Hukum mempelajari manusia dan budaya hukum, karenanya kaidah sosial

yang tidak bersifat hukum bukanlah sasaran pokok penelitian Antropologi Hukum. Norma / kaidah menurut Antropologi Hukum pola ulangan perilaku dalam masyarakat. Norma / Kaidah adalah nilai dasar yang ada dalam masyarakat yang dapat mengukur perilaku manusia agar dapat menilai mana perbuatan benar dan mana yang tidak benar. Norma memiliki aspek hukum ketika aparat menjatuhkan sanksi karena ada perbuatan yang menyimpang atau melanggar hukum. Sanksi bersifat positif seperti dengan membayar denda atau kerja sosial, dan sanksi bersifat negatif seperti hukuman badan atau dikucilkan. Hukum muncul dari peradaban manusia, dimana ada 2 orang atau lebih di situ ada hukum.

Sifat Keilmuan Antropologi Hukum

1. Antropologi Hukum tidak membatasi pandangan pada kebudayaan tertentu (studi perbandingan).
2. Antropologi Hukum, mempelajari masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang utuh, dimana bagian-bagiannya saling bertautan.
3. Antropologi Hukum Modern tidak memusatkan perhatian hanya pada kekuatan sosial dan hal superorganis.
4. Antropologi Hukum memandang masyarakat secara Dinamis, sehingga peranan sosial dan Hukum tidak terbatas mempertahankan status quo.
5. Antropologi Hukum termasuk ilmu Hukum yang empiris.

Ruang Lingkup Antropologi Hukum

Ruang Lingkup Antropologi Hukum adalah suatu spesialisasi dari Antropologi Budaya, Antropologi Sosial, dan Kebudayaan Hukum yang menyangkut Aspek – aspek Hukum.

Laura Nader dalam bukunya “The Anthropological Study of Law “ (1965), mengemukakan masalah pokok yang merupakan ruang lingkup Antropologi Hukum sebagai berikut:

1. Apakah dalam setiap masyarakat terdapat Hukum dan bagaimana karakteristik Hukum yg Universal?
2. Bagaimana Hubungan antara Hukum dengan aspek kebudayaan dan organisasi sosial?
3. Apakah mungkin diadakan Tipologi Hukum tertentu sedangkan variasi karakteristik hukum terbatas?
4. Apakah Tipologi Hukum berguna untuk menelaah hubungan antara Hukum dengan Aspek Budaya dan organisasi sosial
5. Mengapa Hukum itu berubah, serta bagaimana cara mendeskripsikan Sistem-sistem Hukum?

Kaitan Antropologi Hukum dengan ilmu sosial lainnya

1. Antropologi Hukum dengan Hukum Adat
2. Antropologi Hukum dengan Sosiologi
3. Antropologi Hukum dengan Etnologi
4. Antropologi Hukum dengan Religi
5. Antropologi Hukum dengan Psikologi Sosial

Cara mempelajari Antropologi Hukum

1. Metode Historis, yaitu mempelajari perilaku manusia melalui sejarah kebiasaan yang ada dalam masyarakat menjadi adat, berkembang menjadi hukum adat, yang dipertahankan oleh penguasa lalu menjelma sebagai hukum negara.

2. Metode Normatif Eksploratif, yaitu mempelajari perilaku manusia dan budaya hukumnya melalui norma hukum yang sudah ada / yang dikehendaki, bukan sebatas norma hukum yang berlaku, melainkan melihat perilaku manusia barulah mengetahui hukum yang akan diterapkan.
3. Metode Deskriptif Perilaku, yaitu mempelajari perilaku manusia dan budaya hukumnya melalui hukum yang nyata tanpa melihat aturan hukum ideal. Metode ini sempurna apabila disertai metode kasus.
4. Metode Studi Kasus, yaitu pendekatan Antropologi Hukum dengan mempelajari kasus-kasus yang terjadi terutama kasus perselisihan.

Tugas Antropologi Hukum

Tugas Antropologi Hukum adalah memberikan pemahaman tentang hukum-hukum non state law, yaitu memberikan kajian melalui telaah mendalam yang kelak menjadi sistem kajian referensi pembuat undang-undang.

Ilmu Antropologi Hukum dapat dilihat pada persidangan-persidangan atau penyelesaian sengketa yang berlangsung di pengadilan-pengadilan. Hakim yang memiliki pengetahuan akan menggali sumber-sumber hukum yang hidup di tengah masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan. Antropologi Hukum menitikberatkan pada budaya hukum yang berkaitan atau mempengaruhi masalah hukum.

Manfaat Antropologi Hukum

1. secara teoritis dapat mengetahui pengertian-pengertian hukum yang berlaku dalam masyarakat sederhana & modern.

2. dapat mengetahui bagaimana masyarakat bisa mempertahankan nilai-nilai dasar yang dimiliki sekaligus mengetahui bagaimana masyarakat bisa melakukan perubahan-perubahan terhadap nilai-nilai dasar tersebut.
3. dapat mengetahui perbedaan pendapat / pandangan masyarakat atas sesuatu yang seharusnya mereka lakukan.
4. dapat mengetahui suku bangsa / masyarakat mana yang masih kuat / fanatik mempertahankan keberlakuan nilai-nilai budaya mereka.
5. dapat mengetahui suku bangsa / masyarakat mana yang memiliki norma-norma perilaku hukum yang sudah tinggi dan mana yang belum tinggi.

Definisi Hukum dalam Antropologi Hukum

Definisi hukum menurut Hoebel adalah suatu norma sosial, yakni bila terjadi pelanggaran terhadap norma sosial maka yang melanggar akan dikenai sanksi, baik dalam bentuk tindakan fisik, sanksi sosial, atau sanksi lainnya oleh yang memiliki kewenangan bertindak.

Definisi Hukum menurut Pospisil, harus memenuhi 4 syarat atribut, yaitu:

1. Attribute of authority / adanya kewenangan
2. Attribute of Intention of Universal Application / adanya tujuan agar diperlakukan secara universal
3. Attribute of Obligation / adanya hak dan kewajiban
4. Attribute of Sanction / adanya Sanksi.

Beberapa pengertian Antropologi Hukum dalam budaya menurut Pospisil

- Antropologi Hukum tidak membatasi pandangannya pada kebudayaan tertentu masyarakat,

manusia dipelajari dengan cara membandingkan budaya yang berkembang.

- Antropologi Hukum mempelajari masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang utuh dimana bagian-bagiannya saling bertautan.
- Antropologi Hukum modern memperlakukan sama dalam perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial dan hal-hal superorganis dengan peranan individu.
- Antropologi Hukum tidak memandang masyarakat dalam kesimbangan yang mengalami.

Disiplin Antropologi Hukum

Fenomena budaya bukanlah fenomena normatif belaka, melainkan sebuah fenomena simbol yang melahirkan hukum bagi masyarakat pendukung kebudayaan tersebut.

Metode penelitian Antropologi Hukum berupaya menggali simbol, makna, dan sesuatu di balik tabir yang diyakini ada dan dipandang sebagai hukum. Disiplin hukum mencakup, antara lain:

1. Ajaran yang menentukan apakah sebaiknya atau seharusnya dilakukan (perspektif), maupun
2. Ajaran yang menentukan apakah senyatanya dilakukan (deskriptif) dalam hidup.
3. Ajaran-ajaran dalam dogmatik hukum, filsafat hukum, dan politik hukum.

Sifat Disiplin Hukum

Disiplin Hukum yang bersifat riil adalah Obyek Ilmu Kenyataan Hukum, yaitu : Manusia, Kebudayaan, dan Lingkungan Alam. Disiplin Hukum yang bersifat ideal adalah bersumber dari Filsafat Etika, Filsafat Estetika, dan Filsafat Logika. Ruang lingkup Filsafat Etika dan Filsafat Estetika adalah Nilai, Asas, dan Kaidah. Sifat Antropologi Hukum

1. Interdisipliner, yaitu saling membantu dan mendukung dalam menyelesaikan sesuatu,
2. Interdependensi, yaitu saling memiliki keterkaitan atau ketergantungan antara satu dengan lainnya.

3 (tiga) pendekatan Antropologi Hukum dalam mengkaji hukum

1. Pendekatan Holistik (menyeluruh), yaitu mengaitkan antara fenomena hukum dengan aspek kebudayaan secara menyeluruh (POLEKSOSBUDHUAG),
2. Pendekatan Legal Centralism Approach, yaitu pendekatan secara terpusat.
3. Pendekatan Comparative Method, yaitu dengan melakukan studi perbandingan antara sistem-sistem hukum dalam masyarakat yang berbeda-beda di berbagai belahan dunia.

Ciri-ciri Aturan Hukum (B.Malinowski:1959)

1. Aturan hukum, jika dirasakan dan menimbulkan kewajiban disatu pihak dan hak-hak dilain pihak.
2. Aturan hukum itu mempunyai sanksi negatif atau positif berdasarkan kejiwaan dan mekanisme kekuatan yang mengikat.
3. Kekuatan mengikat terwujud dari hubungan timbal balik karena proses tukar menukar jasa.
4. Kekuatan mengikat didasarkan atas hak untuk saling menuntut dalam hubungan yang bersifat ganda.
5. Kekuatan mengikat akan lebih kuat dengan adanya upacara dalam proses transaksi.

Fase-fase Perkembangan Antropologi

1. Fase pertama sebelum tahun 1800

Fase pertama sebelum tahun 1800 yaitu dimulai dengan penjajahan bangsa Eropa pada akhir abad ke-15. Kemudian, memasuki abad ke-16, para penjajah mencari rempah-rempah. Rempah-rempah tersebut dijadikan sebagai bahan baku industri di benua Afrika, Asia, Oecenia, dan Amerika. Dalam perjalanan para penjajah Eropa, ditemani oleh para musafir, sekretaris/pegawai pemerintah jajahan, penerjemah dan para pendeta Nasrani. Dalam perjalanan tersebut, dengan cermat mereka memperhatikan setiap kejadian yang ada di sekitar wilayah persinggahan, terutama tradisi, adat-istiadat dan kebudayaan setempat. Persinggahan tersebut menjadi sangat menarik karena, tradisi-tradisi di wilayah persinggahan sangat berbeda dengan tradisi di kehidupan bangsa Eropa. Akhirnya, benda-benda yang mereka temui di tradisi-tradisi tersebut diboyong ke negeri Eropa. Tradisi yang dijumpai tersebut seperti, kebudayaan di Afrika yang mewajibkan setiap gadis dewasa untuk melebarkan bibirnya. Kemudian, menjulur bibir ke dagunya hingga 5 sampai 10 cm. Setelah dijulurkan, maka pemimpin tradisi tersebut akan memasukan sebuah benda berupa tanah kering menyerupai piringan kecil. Tradisi ini dipercaya berguna agar bibir gadis yang sudah dewasa menjadi besar, dan menjulur ke dagu dalam beberapa tahun kemudian. Dengan begitu, para gadis dewasa akan terlihat lebih cantik. Sementara itu, di Benua Asia dan Oecenai terdapat suku bangsa yang menganggap bahwa wanita cantik dan anggun itu mesti memanjangkan kedua telinganya sampai lebih dari 10 cm. Hal ini dilakukan dengan cara melobangi dan memberikan beban di telinga. Tradisi ini dipercaya dapat membuat telinga perempuan menjadi semakin panjang, dan masih banyak lagi. Temuan tradisi dari para penjajah, kemudian dikumpulkan dalam satu buku laporan, lalu dipresentasikan di hadapan para kaum cendekiawan di daratan Eropa. Berdasarkan temuan tersebut, ditemukan beberapa hal. Pertama, menurut sebagian cendekiawan Eropa bangsa di luar Eropa bukanlah manusia.

Mereka menganggap bangsa di luar Eropa itu sejenis manusia liar, keturunan iblis, dan sebutan bernada miris lainnya. Temuan kedua bertolak belakang dengan temuan pertama, menurut para cendekiawan Eropa masyarakat di luar Eropa masih menunjukkan sifat aslinya sebagai manusia. Hal ini disebabkan karena, cara pikir mereka berbeda dengan cara pikir yang dimiliki oleh masyarakat Eropa. Ketiga sebagai kaum terpelajar masyarakat Eropa, beranggapan bahwa benda-benda temuan selama dipersinggahan adalah benda-benda yang menarik. Sehingga, tidak jarang benda-benda tersebut dijadikan sebagai koleksi di beberapa museum terkenal di Eropa.

2. Fase kedua pertengahan abad ke-19

Upaya koleksi yang sudah terorganisir pada museum terkenal di Eropa, mulai menunjukkan hasil. Para kaum cendekiawan Eropa mempelajari, dan memahami catatan-catatan etnografi itu dengan cara berpikir evolusi masyarakat. Cara berpikir evolusi masyarakat berarti, masyarakat mengalami tahap perkembangan dari tingkat paling rendah hingga paling tinggi. Kemudian, dalam waktu yang cukup lama masyarakat akan mencapai tahap pada tingkat yang lebih kompleks. Para cendekiawan tersebut menyimpulkan bahwa, cara berpikir paling rendah dimiliki oleh masyarakat Benua Afrika, Asia, Oecenia, dan Amerika. Sementara masyarakat dengan tingkat perkembangan yang tinggi, dimiliki oleh masyarakat Eropa. Singkatnya, masyarakat di luar Eropa adalah masyarakat yang dipandang masih primitif, dan masyarakat di Eropa adalah masyarakat yang sudah moderen.

3. Fase ketiga permulaan abad ke-20

Fase ketiga permulaan abad ke-20 dikenal juga dengan abad keemasan bangsa-bangsa Eropa. Hal ini disebabkan karena, mereka telah berhasil memperoleh kekuasaan mutlak atas Sumber Daya Alam (SDA) wilayah di luar Eropa. Tujuan bangsa Eropa dalam mempelajari bangsa-

bangsa jajahan adalah, memahami karakteristik masyarakat, adat istiadat dan tradisinya. Setelah mereka mempelajarinya, maka akan lebih mudah bagi mereka untuk menanamkan ideologi atau nilai-nilai yang dimiliki bangsa Eropa di bidang kebudayaan maupun akses kekuasaan dari negara jajahan. Semua upaya ini sesungguhnya, demi keuntungan bangsa Eropa saat itu. Dengan demikian dalam fase ini dapat disebutkan bahwa antropologi mulai menjadi suatu ilmu yang berisifat praktis. Fase ketiga ingin menegaskan bahwa, antropologi digunakan sebagai upaya untuk mempelajari masyarakat dan kebudayaan suku bangsa di luar Eropa untuk kepentingan penjajah.

4. Fase keempat tahun 1930an

Dikutip dari modul Ruang Lingkup Ilmu Antropologi, pada fase keempat tahun 1930an dapat dikatakan, antropologi mengalami masa yang cukup matang sebagai sebuah ilmu. Hal tersebut diperkaya dengan banyaknya bahan penelitian yang bersumber dari catatan suku bangsa terjajah. Catatan tersebut, telah tersebar hampir di seluruh benua sleain Eropa. Dalam fase ini, antropologi sedang mengalami perubahan dunia yang cukup berarti akibat dua hal. Pertama, meluasnya sikap anti kolonialisme setelah perang dunia II. Sikap ini bermula dari ulah bangsa kolonial sendiri. Mereka saling memperebutkan daerah, dan negeri jajahan agar semakin mudah memperoleh bahan baku industri. Sikap tersebut membuat dunia masuk ke fase kritis. Fase kritis itu ditunjukkan dengan peristiwa bom atom di Herosima, dan Nagasaki. Akibat dari perubahan orientasi tersebut, maka tujuan antropologi dikategorikan ke dalam tiga hal. Pertama, tujuan akademik yaitu memperoleh pengertian mengenai masyarakat manusia pada umunya. Kedua, tujuan praktis yaitu mempelajari dan memahami keragaman masyarakat suku bangsa untuk membantu, dan membangun masyarakat suku bangsa tersebut.

5. Fase kelima sesudah tahun 1970an

Perkembangan antropologi sesudah tahun 1970an salah satunya terdapat dalam, ilmu antropologi di Uni Soviet. Antropolog Uni Soviet juga melakukan penelitian-penelitian. Hasil dari penelitian tersebut, kemudian dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan terkait upaya membangun pengertian di antara penduduk pribumi. Sementara itu, antropologi di Indonesia berkembang sebagai pengkajian masalah sosial budaya, serta upaya mendeskripsikan berbagai kehidupan dari berbagai suku bangsa. Deskripsi tersebut bermula dari Sabang sampai Marauke. Hal ini bertujuan agar masyarakat bisa saling mengenal dengan lainnya. Dilansir dari Pengantar Antropologi upaya-upaya tersebut terus dilakukan hingga kini karena masih banyak suku-suku bangsa yang jumlah anggotanya relatif sedikit, dan masih banyak suku-suku bangsa yang hidup di beberapa daerah yang terpencil. Menurut Koentjaraningrat, ilmu antropologi di Indonesia cenderung belum mempunyai tradisi yang cukup kuat. Untuk itu, antropologi di Indonesia dapat mencontoh antropologi Meksiko, maupun Amerika.

C. PENUTUP

Ilmu tentang hayati terdiri dari: Paleo Antropologi dan Antropologi Fisik. Untuk mempelajari kehidupan asal usul manusia, dan untuk mengetahui ragam bahasa manusia maka harus mempelajari Etnolinguistik, Antropologi Antropologi terbagi dalam: Antropologi Ekonomi, Antropologi Politik, Antropologi Pendidikan, dan Antropologi Hukum. Sebagai Ilmu Pengetahuan, Antropologi Hukum dicirikan oleh 3 (tiga) hal yaitu adanya: Objek, Metode, dan Sistem. Antropologi Budaya, memiliki karakter: Antropologi Hukum, Manusia dan Budaya. Kajian Antropologi Hukum adalah menggali norma dan nilai-

nilai dalam masyarakat. Ruang Lingkup Antropologi Hukum adalah suatu spesialisasi dari Antropologi Budaya, Antropologi Sosial, dan Kebudayaan Hukum. Kaitan Antropologi Hukum dengan ilmu sosial lainnya : Antropologi Hukum dengan Hukum Adat, Antropologi Hukum dengan Sosiologi, Antropologi Hukum dengan Etnologi, Antropologi Hukum dengan Religi, Antropologi Hukum dengan Psikologi Sosial. Cara mempelajari Antropologi Hukum: Metode Historis, Metode Normatif Eksploratif, Metode Deskriptif Perilaku dan Metode Studi Kasus. Tugas Antropologi Hukum adalah memberikan pemahaman tentang hukum-hukum non state law. Ilmu Antropologi Hukum dapat dilihat pada persidangan-persidangan atau penyelesaian sengketa yang berlangsung di pengadilan-pengadilan. Disiplin Hukum yang bersifat riil adalah Obyek Ilmu Kenyataan Hukum, yaitu : Manusia, Kebudayaan, dan Lingkungan Alam. Disiplin Hukum yang bersifat ideal adalah bersumber dari Filsafat Etika, Filsafat Estetika, dan Filsafat Logika. Ruang lingkup Filsafat Etika dan Filsafat Estetika adalah Nilai, Asas, dan Kaidah.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, Volume 47, Nomor 1, 2018.
<https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.10-21>
- Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 201.
<http://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>.

- Laurensius Arliman S, Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa, *Padjadjaran Journal of Law*, Volume 4, Nomor 3, 2017. <https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.3433>.
- Laurensius Arliman S, Penanaman Modal Asing Di Sumatera Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, *Supremasi Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2018. <http://dx.doi.org/10.36441/hukum.v1i01.102> .
- Laurensius Arliman S, Memperkuat Kearifan Lokal Untuk Menangkal Intoleransi Umat Beragama Di Indonesia, *Ensiklopedia of Journal*, Volume 1, Nomor 1, 2018, <https://doi.org/10.33559/eoj.v1i1.18>.
- Laurensius Arliman S, Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional, *Kertha Patrika*, Volume 39, Nomor 3, 2017, <https://doi.org/10.24843/KP.2017.v39.i03.p03>.
- Laurensius Arliman S, Partisipasi Masyarakat Di Dalam Pengelolaan Uang Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *Jurnal Arena Hukum*, Volume 12, Nomor 2, 2019, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.5>.
- Laurensius Arliman S, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia, *Dialogica Jurnalica*, Volume 11, Nomor 1, 2019, <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>.
- Laurensius Arliman S, Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional, *UIR Law Review*, Volume 2, Nomor 2, 2018, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2\(02\).1587](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1587)

Laurensius Arliman S, Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia, Doctrinal, Volume 1, Nomor 2, 2016.

Laurensius Arliman S, Ni Putu Eka Dewi, *Protection of Children and Women's Rights in Indonesiathrough International Regulation Ratification*, Journal of Innovation, Creativity and Change Volume 15, Nomor 6, 2021.

Laurensius Arliman S, *Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian Dari Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Utilitarianisme*, Jurnal Yuridis, Volume 3, Nomor 2, 2016, <http://dx.doi.org/10.35586/v3i2.180>.

Laurensius Arliman S, Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0, Jurnal Ensiklopedia Sosial Review, Volume 2, Nomor 3, 2020..